

ANALISIS PENYERAPAN ANGGARAN PASCA PENERAPAN APLIKASI SiPP PADA SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WIL. I DINAS PU PROV. KALTIM

Egiastyo Dwi Kuncoro¹

Abstrak

Sistem Pemantauan Proyek atau yang disingkat menjadi (SiPP) adalah suatu aplikasi yang diterbitkan oleh Sistem Informasi Manajemen Bina Marga yang merupakan Sub Bidang Direktorat Jenderal Bina Marga untuk memantau, mengawasi dan sebagai internal control yang dioperasikan oleh petugas pelaporan pada kegiatan penyusunan dan pelaksanaan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum pada umumnya, dan pada khususnya dilingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

Penelitian dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur, dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan tingkat persentasi penyerapan anggaran sebelum dan sesudah penerapan aplikasi SiPP, dengan cara menganalisis apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap penyerapan anggaran instansi sebelum dan sesudah diterapkannya aplikasi SiPP, Uji Beda (Paired Sample T-test). Paired Sample T-test digunakan untuk menentukan ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel bebas yang berpasangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini, yaitu terdapat perbedaan yang signifikan penyerapan anggaran sebelum dan sesudah penggunaan aplikasi SiPP dapat di jawab dengan menggunakan uji sampel berpasangan (paired sample t test) dengan aplikasi SPSS (Statistical Product and Service Solutions). Dapat disimpulkan bahwa penerapan aplikasi SiPP mempengaruhi penyerapan anggaran daripada sebelum diterapkannya aplikasi SiPP.

Dengan adanya aplikasi SiPP Kasatker selaku Kuasa Pengguna Anggaran dapat memantau/mengawasi secara langsung progres/kemajuan penyerapan anggaran ditahun berjalan atau tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat bahwa selama kurun waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2011 persentase penyerapan anggaran setelah penerapan aplikasi SiPP (tahun 2008 – 2011) mengalami kenaikan persentase tiap tahunnya.

Kata Kunci : Analisis Penyerapan Anggaran, Aplikasi SiPP

¹ Mahasiswa S1 (AJ) Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, email : egi_hammet@yahoo.com

Pendahuluan

Dinas Pekerjaan Umum sebagai salah satu instansi pemerintahan yang berperan serta dan bertugas dalam pembangunan negara bertanggung jawab dalam melaksanakan dan menyelenggarakan good governance sesuai dengan 10 prinsip tata pemerintahan yang baik yaitu : Partisipasi, Penegakan Hukum, Transparansi, Kesenjangan, Daya Tanggap, Wawasan Ke Depan, Akuntabilitas, Pengawasan, Efisiensi dan Efektivitas serta Profesionalisme. Dalam mewujudkan hal tersebut diatas, maka diperlukan adanya suatu sistem pengawasan dan pengendalian untuk mencapai transparansi penggunaan anggaran serta efektivitas pelaksanaan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum.

Sistem Pemantauan Proyek atau yang disingkat menjadi (SiPP) adalah suatu aplikasi yang diterbitkan oleh Sistem Informasi Manajemen Bina Marga yang merupakan Sub Bidang Direktorat Jenderal Bina Marga untuk memantau, mengawasi dan sebagai internal control yang dioperasikan oleh petugas pelaporan pada kegiatan penyusunan, dan penyerapan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum pada umumnya, dan pada khususnya dilingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur (Satker PJN Wil. I DPU Prov. Kaltim).

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Anggaran, Definisi anggaran atau budget menurut Munandar (2001:03) adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku dalam jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang. Anggaran merupakan alat untuk merencanakan dan mengendalikan keuangan perusahaan dalam penyusunannya dilakukan secara periodik. Pengertian lain dari anggaran menurut Nafarin (2007:11) menyatakan bahwa anggaran adalah suatu rencana kuantitatif (satuan jumlah) periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa.

Sedangkan menurut Garrison dan Noreen (2007:402) mendefinisikan anggaran adalah rencana rinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya untuk suatu periode tertentu.

Pengertian Penyerapan Anggaran, Penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban penyerapan anggaran. Tahapan penyerapan anggaran ini dimulai ketika Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disahkan oleh DPR. Dalam rangka terjadinya kesatuan pemahaman serta

kesatuan langkah dalam pelaksanaan, pemerintah sebagai pelaksana dari UU APBN selanjutnya menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai dasar hukum pelaksanaan APBN. Pada saat ini Keppres yang berlaku adalah Keppres nomor 42 tahun 2002.

Ketika Undang-Undang tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disetujui oleh DPR dan ditetapkan sebagai UU APBN, maka selesailah tahapan kedua dari siklus anggaran yaitu tahapan penetapan dan pengesahan UU APBN oleh DPR. Pada saat ini, dimulailah tahap ketiga yaitu tahap pelaksanaan anggaran (APBN) yang merupakan kewenangan Presiden selaku kepala pemerintah untuk melaksanakan seluruh kebijakan yang telah tertuang dalam undang-undang tersebut. Pada awal tahun anggaran, langkah pertama yang dilakukan dalam tahap pelaksanaan anggaran meliputi penetapan pejabat pengelola anggaran serta penerbitan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai dasar hukum pelaksanaan anggaran bagi masing-masing kementerian/lembaga dan instansi pemerintah lainnya.

Pengertian Aplikasi, Aplikasi berasal dari kata application yang artinya penerapan, lamaran, penggunaan. Secara istilah aplikasi adalah program atau software siap pakai yang di rekayasa/dirancang untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain dan dapat digunakan oleh sasaran yang dituju. (Ghozali Imam, 2002:12).

Aplikasi merupakan program yang khusus melakukan suatu pekerjaan tertentu seperti program gaji, absensi, penyusunan dan pengelolaan anggaran pada suatu perusahaan. Program aplikasi ini hanya dapat digunakan oleh bagian tertentu saja tidak dapat digunakan oleh bagian yang lain. Biasanya program aplikasi ini dibuat oleh seorang programmer komputer sesuai dengan permintaan, kebutuhan seorang/instansi maupun perusahaan guna keperluan intern. Contoh : program aplikasi SiPP, e-Monitoring, RKA-KL dan lain-lain. Program Aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.

Pengertian SiPP (Sistem Pemantauan Proyek), SiPP adalah sebuah aplikasi komputer yang dibangun/dirancang untuk melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian internal terhadap Balai/Satuan Kerja (satker) / Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) yang berada dalam lingkup kewenangan dan tanggung jawab setiap pelaksanaan Balai/Satker/SNVT yang bernaung di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga. SiPP mempunyai 2 jenis komponen yaitu SiPP offline dan SiPP online. SiPP offline digunakan untuk memasukkan data dan pengiriman data ke Pusat, sedangkan SiPP online berfungsi untuk menampilkan laporan-laporan berdasarkan data yang telah diterima.

Secara umum aplikasi SiPP bekerja sejak adanya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), prakontrak, pelaksanaan kontrak masing-

masing paket, rencana pekerjaan yang ada sampai dengan realisasi keuangannya. Data yang telah dimasukkan tersebut kemudian di kirim (upload) ke server yang ada di Jakarta dan selanjutnya setiap data yang masuk siap dilaporkan dengan menampilkannya melalui sistem yang tersedia dalam program aplikasi SiPP online.

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional merupakan dasar-dasar konsep yang jelas bagi unsur-unsur yang akan diteliti (Syamsudin, 1996:42). Salah satu fungsi dari definisi konsepsional adalah untuk menghindari perbedaan dan penafsiran tentang variable-variabel penelitian yang akan diuji antara konsep peneliti dengan pembaca (Nurhadi, 1992:12). Definisi konsepsional biasanya diambil dari definisi-definisi yang dianggap umum dan dianggap paling tepat. Berdasarkan pada variabel penelitian dan permasalahannya, maka definisi konsepsional pada penelitian ini meliputi :

1. Penyerapan Anggaran, Penyerapan anggaran dalam penelitian ini adalah tahap penyusunan dan penetapan anggaran sampai dengan tahap pertanggung jawaban anggaran, pelaksanaan anggaran yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh para pejabat instansi Kementerian Negara/lembaga selaku pengguna anggaran/kuasa anggaran, dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Aplikasi SiPP, Adalah sebuah software/program aplikasi komputer yang dibangun/dirancang untuk melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian internal terhadap kegiatan pelaksanaan anggaran dilingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur.

Metode Penelitian

Definisi Operasional, variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian dan definisinya adalah sebagai berikut :

1. Dalam penelitian ini penulis mengasumsikan bahwa aspek teknis (realisasi fisik) sebagai pendamping penyerapan anggaran telah terpenuhi 100 %.
2. Penyerapan anggaran yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target rencana yang telah dicapai oleh instansi sebelum dan sesudah diterapkannya aplikasi SiPP.
3. Aplikasi SiPP adalah sebuah software / program aplikasi komputer yang dibangun/dirancang untuk melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian internal terhadap kegiatan pelaksanaan anggaran dilingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur.

Rincian Data Yang Digunakan

1. Gambaran umum instansi
2. Struktur organisasi
3. Data penyerapan anggaran periode tahun 2004 sampai dengan 2007
4. Data penyerapan anggaran periode tahun 2008 sampai dengan 2012
5. Data – data lain yang berhubungan dengan penulisan

Jangkauan Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur yang berlokasi di Jl. Tengawang No.1 Samarinda. Fokus penelitian ini adalah pada penyerapan anggaran dengan menggunakan data laporan penyerapan anggaran dari tahun 2004 sampai tahun 2011.

Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan beberapa cara atau teknik dengan maksud agar data yang penulis dapatkan merupakan informasi yang diperlukan untuk hasil akhir penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Interview (wawancara) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara komunikasi secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan obyek penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan komunikasi atau tanya jawab secara langsung dengan pihak instansi yang berwenang mengenai pelaksanaan penyerapan anggaran instansi.
2. Observasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dimana penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan cara survey ke lapangan untuk dapat memperoleh data berupa laporan bulanan, triwulan dan tahunan pelaksanaan penyerapan anggaran instansi sehingga dapat membantu penulis dalam penelitian.
3. Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dimana penulis memperoleh dokumentasi berupa data-data dari laporan bulanan penyerapan anggaran yang berhubungan dengan obyek yang diteliti, antara lain DIPA, Penerbitan SPM dan SP2D dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2011.
4. Studi Pustaka yaitu teknik yang menggunakan buku-buku sebagai literatur untuk membuktikan teori-teori yang telah penulis dapatkan dengan kenyataan di lapangan yang berhubungan dengan obyek penelitian.

Alat Analisis

Dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap penyerapan anggaran instansi sebelum dan sesudah diterapkannya Aplikasi SiPP, Uji Beda (Paired Sample T-test). Paired

Sample T-test digunakan untuk menentukan ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel bebas yang berpasangan.

Uji statistik untuk pengujian hipotesis data berpasangan dinyatakan sebagai berikut :

$$t = \frac{\bar{D}}{sd/\sqrt{n}}$$

dan standar deviasi (sd) dirumuskan sebagai berikut :

$$s = \sqrt{\frac{\sum d^2 - \frac{(\sum d)^2}{n}}{n-1}}$$

Dimana :

t : Nilai distribusi t

D : Rata-rata perbedaan antara pengamatan berpasangan

Sd : Standar deviasi dari perbedaan antara pengamatan berpasangan

n : Jumlah pengamatan berpasangan

d : Perbedaan antara data berpasangan

Hipotesa dalam pengujian ini menggunakan pengujian hipotesis alternatif dua arah, hipotesa yang digunakan adalah sebagai berikut :

$H^0 : \mu = \mu_0$ Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara penyerapan anggaran sebelum dan sesudah penerapan aplikasi SiPP

$H^1 : \mu \neq \mu_0$ Terdapat perbedaan yang signifikan antara penyerapan anggaran sebelum dan sesudah penerapan aplikasi SiPP

Untuk membuktikan hipotesis tersebut, penulis menggunakan alat bantu berupa program aplikasi / software SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum Instansi

Lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Provinsi Kalimantan Timur terletak di Jl. Tengawang No. 01 Samarinda. Salah satu prasarana yang tidak kalah pentingnya dengan prasarana lain adalah terdapatnya suatu kantor yang merupakan tempat diselenggarakannya penanganan informasi, mulai dari menerima, mengumpulkan, mengelolah, menyimpan sampai dengan menyalurkan informasi yang benar. Berdasarkan fakta yang dibutuhkan oleh pimpinan dalam rangka mengatur dan mengendalikan kegiatan organisasinya.

Kantor Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Provinsi Kalimantan Timur ini bergerak dalam bidang Urusan Pekerjaan Umum, yang mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya keselarasan penyediaan sarana dan prasarana pekerjaan umum menuju keselarasan wilayah Kalimantan Timur yang diselenggarakan secara terpadu, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan memberdayakan masyarakat.

Misi : Pembangunan sarana dan prasarana pengairan yang mendukung ketahanan penyediaan dan pendayagunaan sumber daya air untuk kesejahteraan rakyat. Pembangunan sarana dan prasarana jalan untuk mendukung kelancaran transportasi darat sebagai bagian sistem transportasi untuk menunjang lalu lintas ekonomi. Pembangunan sarana dan prasarana pemukiman untuk menciptakan pemukiman yang layak, sehat dan terjangkau serta mendorong pengembangan wilayah / kawasan tertentu.

Analisis dan Pembahasan

Data dalam penelitian ini diperoleh dari data realisasi penyerapan pelaksanaan anggaran Satker PJN Wil. I periode Tahun Anggaran 2004 s/d 2007 (sebelum penggunaan aplikasi SiPP) dan periode Tahun Anggaran 2008 s/d 2011 (sesudah penggunaan aplikasi SiPP). Dalam hal ini, tahun 2008 merupakan *Cut-Off* antara dua kelompok, karena tahun 2008 merupakan awal pelaksanaan penerapan aplikasi SiPP di Satker PJN Wil. I secara terstruktur. *Cut-Off* ini berfungsi sebagai pembatas untuk membedakan tingkat penyerapan anggaran yang dicapai instansi dalam kurun waktu beberapa tahun yang dapat dipengaruhi oleh penerapan aplikasi SiPP.

Dari hasil telaah dokumen pada Satker PJN Wil. I Periode Tahun Anggaran 2004 s/d 2011 diperoleh data sebagai berikut :

Periode Tahun Anggaran 2004 s/d 2007 (sebelum penggunaan aplikasi SiPP)

No.	Tahun	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi Penyerapan Anggaran (Rp.)	Persentase (%)
1	2004	23,528,752,000.00	17,010,695,124.73	72.30
2	2005	97,883,823,000.00	87,107,126,941.00	88.99
3	2006	71,978,691,000.00	62,200,313,275.00	86.41
4	2007	74,475,220,000.00	63,671,541,214.00	85.49

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kaltim 2012

Periode Tahun Anggaran 2008 s/d 2011 (setelah penggunaan aplikasi SiPP)

No.	Tahun	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi Penyerapan Anggaran (Rp.)	Persentase (%)
1	2008	85,918,008,000.00	80,469,846,496.00	93.66
2	2009	136,151,762,000.00	130,485,605,254.00	95.84
3	2010	196,498,213,000.00	190,381,794,758.00	96.89
4	2011	248,705,247,000.00	245,321,792,870.00	98.64

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kaltim 2012

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui sebelum dan sesudah penggunaan aplikasi SiPP. Data yang kemudian dibandingkan adalah persentasi penyerapan anggaran baik sebelum maupun sesudah penggunaan aplikasi SiPP. Daya serap anggaran tertinggi terjadi pada tahun 2011, yaitu 98.64 % dan daya tahan serap anggaran terendah terjadi pada tahun 2004, yaitu sebesar 72.30 %.

Untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini, yaitu terdapat perbedaan yang signifikan daya serap pelaksanaan anggaran sebelum dan sesudah penggunaan aplikasi SiPP dapat di jawab dengan menggunakan uji sampel berpasangan (*paired sample t test*) dengan program aplikasi SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*).

Nilai rata-rata penyerapan anggaran sebelum penggunaan aplikasi SiPP antara tahun 2004-2007 adalah 83.30 %, sementara rata-rata penyerapan anggaran sesudah penggunaan aplikasi SiPP antara tahun 2008-2011 adalah 96.26%.

Nilai t_{hitung} adalah sebesar - 4.203 dengan sig 0.025. Karena sig < 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa H^0 ditolak dan H^1 diterima, artinya terdapat perbedaan yang signifikan penyerapan anggaran sebelum dan sesudah penerapan aplikasi SiPP.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penggunaan aplikasi SiPP mempengaruhi daya serap penggunaan anggaran pada Satker PJN Wil I. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah “diterima”. “Terdapat perbedaan yang signifikan penyerapan anggaran sebelum dan sesudah diterapkannya aplikasi SiPP pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur”.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan aplikasi SiPP mempengaruhi penyerapan anggaran daripada sebelum diterapkannya program aplikasi SiPP. Dengan adanya aplikasi SiPP Kasatker selaku Kuasa Pengguna Anggaran dapat memantau/mengawasi secara langsung progres/kemajuan penyerapan anggaran ditahun berjalan atau tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat bahwa selama kurun waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2011 persentase penyerapan anggaran setelah penerapan aplikasi SiPP (tahun 2008 – 2011) mengalami kenaikan persentase tiap tahunnya.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan efektivitas dan transparansi pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur, diperlukan adanya suatu sistem pengawasan dan pengendalian. Sistem Pemantauan Proyek atau yang disingkat menjadi (SiPP) adalah suatu program aplikasi yang diterbitkan untuk memantau, mengawasi

dan sebagai internal control yang dioperasikan oleh petugas pelaporan pada kegiatan penyusunan dan pelaksanaan anggaran.

Tahun 2008 merupakan awal pelaksanaan penerapan program aplikasi SiPP di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur secara terstruktur.

Dari hasil pengujian dapat diketahui daya serap anggaran tertinggi terjadi pada tahun 2011, yaitu 98.64 % dan daya tahan serap anggaran terendah terjadi pada tahun 2004, yaitu sebesar 72.30 %.

Untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini, di jawab dengan menggunakan uji sampel berpasangan (*paired sample t test*). Nilai t_{hitung} adalah sebesar -4.203 dengan sig 0.025. Karena sig < 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa H^0 ditolak dan H^1 diterima, artinya terdapat perbedaan yang signifikan penyerapan anggaran sebelum dan sesudah penerapan program aplikasi SiPP. dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penggunaan aplikasi SiPP mempengaruhi daya serap pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

Sebagai saran agar Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur dapat lebih baik dalam menjalani pelaksanaan anggaran, maka dapat diajukan saran sebagai berikut : Mengkaji ulang realisasi penyerapan anggaran tahun sebelumnya untuk bahan evaluasi tahun selanjutnya, perencanaan penyerapan anggaran yang lebih matang untuk tahun selanjutnya, pemutahiran Aplikasi SiPP serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia seperti : melakukan pembinaan dan pelatihan keterampilan petugas pelaporan agar tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan pelaksanaan penyerapan anggaran, koordinasi antara pimpinan dan bawahan agar tercipta informasi yang cepat, tepat dan efisien.

Daftar Pustaka

- Ali Tojib M., Drs. Anggaran Negara. Pusdiklat Anggaran BPLK Depkeu. Jakarta. 1996.
- Bijloo J. Perbendaharaan. Komisi Penterjemah. Depkeu. Jakarta. 1979.
- Goedhart C., Dr. Garis-garis Besar Ilmu Keuangan Negara. Terjemahan oleh Ratmoko, S.H. Penerbit Jembatan. 1982.
- Wiemas AJGA. Sistem Tata Usaha Keuangan Indonesia. Komisi Penterjemah. Depkeu. Jakarta. 1982.
- Modul 1: Kebijakan Umum Pengadaan Barang dan Jasa. Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan. 1995.
- Peraturan-peraturan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Amandemennya
Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang-undang No. 29 Tahun 2002 tentang APBN Tahun 2003
Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 jo Keppres No. 72 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Sutrisno, 2001, Manajemen Keuangan, Penerbit Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta
Sugiyono Drs., 1999, Statistika untuk Penelitian, Penerbit CV Alfabeta, Bandung
Husnan Suad, 1998, Manajemen Keuangan, BPFE, Yogyakarta